

Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin

Maulida Rachma¹, Yusuf Hidayat², Laila Azkia³

Pendidikan Sosiologi^{1'2'3}

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Email: maulida.sosiologi.ulm@gmail.com

Abstrak, Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Pemerintah dalam upayanya menurunkan tingginya angka kemiskinan salah satunya dengan cara meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan melalui program berbasis perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pelambuan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data dipilih secara *Purposive Sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pelambuan, masih terdapat beberapa hambatan, yang kemudian dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni: hambatan pada pelaksanaan (a) secara internal dan (b) secara eksternal. Selanjutnya adalah hambatan pada Pendamping Sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan kepada Unit Pengurus PKH wilayah Kota Banjarmasin harus lebih mengontrol bagaimana titik hasil dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, sudah sejauh mana berjalan, agar pemantauan dan evaluasi kinerja untuk tahap berikutnya dapat terkendali dengan baik.

Kata kunci: *Hambatan Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan Sosial*

I. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai hampir di

seluruh wilayah di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pada kenyataannya, di Indonesia sendiri masalah kemiskinan masih sangat sulit untuk diberantas. Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin diwujudkan agar masyarakat tersebut dapat hidup layak serta mengembangkan

dirinya sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik (Astriana, 2012, hal. 2).

Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, contoh; bantuan langsung tunai (BLT), RASKIN. Sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh; Program Jamkesmas (bidang kesehatan), Program IDT (bidang pemberdayaan), BOS (bidang pendidikan). Walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran (dana), setelah dana habis maka selesai pula kegiatan program. Dengan kata lain bahwa program-program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan projek dan bukan pendekatan program. Tidak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan, akhirnya angka kemiskinan secara absolut di Indonesia tetap saja tinggi (Nunung, 2008, hal. 8). Pemerintah dalam upayanya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH) mulai diperkenalkan pada tahun 2007 dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Pemberdayaan Usaha mikro (KUR) (Pratiwi, 2020, hal. 3).

Sejak mulai diimplementasikan, Program Keluarga Harapan terus berinovasi sehingga terus mengalami perkembangan. Arah kebijakan PKH bukan hanya sekedar memastikan bantuan tepat sasaran dan membantu kelancaran penyaluran bantuan sosial, utamanya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan KPM PKH yang graduasi, bukan hanya karena tidak memenuhi syarat kepesertaan, namun KPM PKH juga bisa berdaya dan mandiri (RI, 2020).

Graduasi itu sendiri memiliki makna bahwa tidak lagi terpenuhinya kriteria kepesertaan dan/atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data. Dengan kata lain, jika Keluarga Penerima Manfaat sudah tidak lagi memiliki komponen untuk diberikan bantuan, atau bahkan status sosial ekonominya sudah meningkat sesuai standar yang telah ditetapkan, Keluarga tersebut pastinya akan mengalami Graduasi atau kelulusan dari Program Keluarga Harapan. Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti bahwa jumlah Graduasi KPM PKH, baik yang dilakukan secara mandiri atau melalui dorongan Pendamping PKH, menyebutkan di Kota Banjarmasin pada dua tahun terakhir, secara bertahap mengalami kenaikan jumlah yang tidak menentu, terutama pada Kecamatan Banjarmasin Barat, dan terkhususkan lagi pada Kelurahan Pelambuan yang sejak dua tahun ini mengalami lonjakan Graduasi paling tinggi diantara Kelurahan lainnya.

Hadirnya Program Keluarga Harapan di Kota Banjarmasin, terutama di Kelurahan Pelambuan dengan jumlah Graduasi terbanyak selama dua tahun diantara Kelurahan lainnya yang ada di Kota Banjarmasin, tentunya fungsi peran Program dan Pendampingan dalam strategi bantuan merupakan aspek yang sangat penting untuk dikaji.

Penelitian yang berkaitan dengan Peranan Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, sering dilakukan

untuk mengukur bagaimana kemajuan dan perkembangan Program Keluarga Harapan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Adapun terdapat tiga penelitian terkait Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang lokasi penelitiannya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, akan tetapi relevan untuk dikaitkan dengan penelitian ini. Adapun tiga penelitian tersebut yaitu:

Penelitian yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bagus Purnawiratama, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Penelitian tersebut mengambil judul “Kehidupan Sosial Ekonomi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan” dengan mengambil studi kasus di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Mengetahui gambaran sosial ekonomi penerima Program Keluarga Harapan (PKH); (2) Mengetahui aspek pendidikan penerima Program Keluarga Harapan (PKH); (3) Mengetahui aspek kesehatan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Gambaran Kehidupan sosial ekonomi dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif walaupun sudah menerima bantuan tunai tiap-tiap keluarga masih mencari pengasilan, tidak serta merta mengharapkan bantuan tunai dalam menafkahi keluarga (2) Aspek Pendidikan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah berpendidikan Sekolah Dasar bahkan ada yang hingga sampai Perguruan Tinggi namun pada umumnya bersekolah di sekolah negeri dan swasta yang tidak berbiaya tinggi (3) Aspek Kesehatan ibu dan anak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mendapatkan layanan kesehatan BPJS, pemeriksaan, pengobatan baik di Posyandu maupun Puskesmas yang ada di Kelurahan Kelayan Timur (Purnawiratama, 2018).

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Nurdiana, Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. Penelitian tersebut mengambil judul “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa”, dengan mengambil studi kasus di wilayah Kecamatan Mambi, Kabupaten Masama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa, dapat dilihat dari proses sosialiasasi hingga distribusi dana PKH yang dilakukan oleh pendamping. Keberhasilan sosialisasi akan terlihat apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan pemerintah, pendistribusian dana PKH kepada peserta PKH, dilakukan pula di sekolah-sekolah yang letaknya strategis yang bisa terjangkau oleh penerima PKH (Nurdiana, 2017).

Penelitian ketiga, yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Mohammad Rizal, Mahasiswa Program Studi Filsafat Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut mengambil judul “Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017”, dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 yang lalu. Hasil dari penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Program Keluarga Harapan dan kesejahteraan masyarakat. Program Keluarga Harapan menunjukkan korelasi yang sangat kuat dengan nilai 0,944. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi sebesar 0,890. Yang artinya 89% kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 dipengaruhi oleh Program Keluarga Harapan dan sebesar 11% kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh faktor lainnya (Rizal, 2018).

Dari ketiga penelitian terdahulu, belum ada yang melakukan penelitian terkait apa saja Hambatan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, kebaruan dan pembeda dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari tahu terkait apa saja hambatan dalam pelaksanaan program itu sendiri.

Berangkat dari rujukan terkait Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaannya di lapangan. Mengingat tingkat kesuksesan Graduasi terbanyak yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat adalah Kelurahan Pelambuan, sehingga pada akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan pembahasan utama penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif. Penggunaan kualitatif diharapkan mampu menganalisis cakupan sumber data dengan lebih luas, menyeluruh, mendalam dan bermakna terkait Hambatan dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan. Diharapkan pula dapat membantu menguraikan persoalan yang ada di rumusan masalah yang akan diteliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data; observasi, dokumentasi dan wawancara.

Sumber data peneliti dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH), yakni: sebagai KPM PKH minimal 1 tahun, merupakan keluarga yang termasuk dalam kategori sangat miskin (pra-sejahtera), termasuk ke dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), serta memiliki salah satu komponen persyaratan sebagai penerima Manfaat PKH sesuai kategori, yakni: bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Lansia dan atau Disabilitas Berat). Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. Peneliti yang melakukan semuanya mulai dari menetapkan judul penelitian, fokus penelitian, menentukan landasan teori, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsir data dan membuat kesimpulan atas temuan dilakukan sendiri oleh peneliti. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan oleh peneliti. Peneliti dalam melakukan penelitian juga menggunakan alat untuk mendukung pengumpulan data seperti alat tulis, kamera, dan alat-alat perekam saat wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin

Hambatan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, sangat bergantung pada Kebijakan dari program itu sendiri dan Pendamping Sosial sebagai pelaksana program di lapangan. Kebijakan program telah dirancang dan diperbaharui sedemikian rupa sesuai evaluasi yang telah dilakukan dari hasil pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan sendiri tidak terlepas

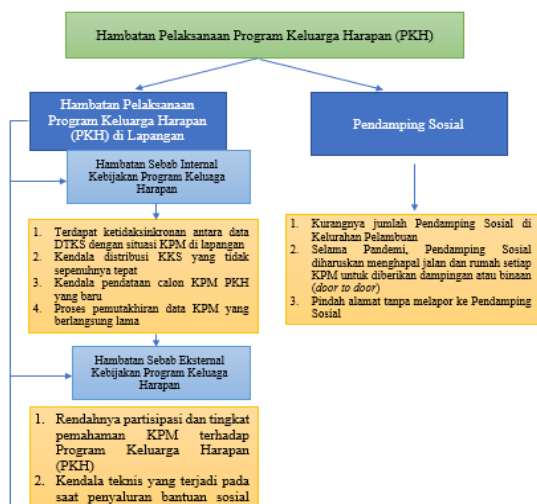
dari berbagai kendala yang timbul akibat proses yang rumit dan kompleks, kendala tersebut menjadi penghambat dalam keberhasilan suatu pelaksanaan bahkan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan tersebut. Karakteristik masalah merupakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi seperti yang dikemukakan oleh Mazamanian dan Sabatier dalam Subarsono yang mengidentifikasi karakteristik masalah yang terdiri atas; 1) kesulitan teknis, 2) Keragaman perilaku kelompok sasaran, 3) Proporsi kelompok sasaran, dan 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan (Subarsono, 2008, hal. 95-96):

Berdasarkan karakteristik permasalahan tersebutlah, analisis beberapa hambatan yang ditemukan di lapangan kemudian dibagi menjadi, (1) hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan; (a) ditinjau dari sebab internal; (b) sebab eksternal dari Program Keluarga Harapan (PKH); dan juga (2) hambatan dari Pendamping Sosial.

Berikut adalah bagan gambaran hasil penemuan hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dirasakan oleh KPM di Kelurahan Pelambuan:

Skema 8.

Gambaran Hasil Penemuan Hambatan Pelaksanaan PKH



Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti, 2022

Pada pelaksanaan di lapangan, Program ini dinilai telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kelurahan Pelambuan. Meskipun demikian, pelaksanaan suatu program dapat dipastikan akan selalu mengalami suatu hambatan atau permasalahan. Begitu pula yang terjadi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin.

Hal ini selaras dengan pandangan Wibawa, Purbokusumo dan Pramusinto, yang mengemukakan bahwa dalam kenyataannya tidak selamanya kebijakan publik itu mencapai sasaran setelah dilaksanakan, walaupun sudah direncanakan sedemikian rupa. Karena pada saat dilaksanakan banyak sekali terkait dengan berbagai hal yang kompleks dan tidak mudah untuk dieliminir (Wibawa, Purbokusumo, & Pramusinto, 1994, hal. 32).

Menunjuk pada pandangan Wibawa, Purbokusumo dan Pramusinto tersebut, kebijakan publik yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Dari hasil penemuan di lapangan terkait hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), diketahui bahwasanya terdapat tujuh kendala pada saat pelaksanaannya di lapangan sepanjang tahun 2021.

Pembahasan terkait hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian akan dibagi menjadi tiga kategori; ditinjau dari sebab internal, sebab eksternal dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga hambatan dari Pendamping Sosial.

1) Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Lapangan

a. Hambatan Sebab Internal

Berdasarkan hasil penemuan di lapangan, indikator hambatan pelaksanaan dalam kebijakan Program Keluarga Harapan, berkenaan dengan efektivitas dari kebijakan program itu sendiri; bantuan sosial, bantuan komplementer, hak dan kewajiban PKH, Pertemuan Kelompok P2K2, mekanisme pelaksanaan PKH, dan lain

sebagainya), apakah ditemukan permasalahan atau tidaknya selama program tersebut dijalankan.

1. Terdapat Ketidaksinkronan Antara Data DTKS dengan Situasi KPM yang Sebenarnya Sepanjang tahun 2021, arah kebijakan dari Program Keluarga Harapan mengalami gebrakan baru, yakni gerakan masal sinkronisasi data DTKS dengan situasi KPM yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya, proses evaluasi program dan pemutakhiran data para KPM tidak berjalan dengan maksimal dan seringkali mengalami kendala teknis; seperti kembalinya nama-nama KPM yang sudah dinyatakan Graduasi ke dalam portal data. Atau juga sejak awal pendataan DTKS tidak dilakukan dengan proses yang benar, sehingga masyarakat yang seharusnya menjadi KPM PKH, tetapi tidak menjadi Penerima Manfaat dikarenakan tidak terdata namanya. Data DTKS yang menjadi acuan atau dasar penetapan calon penerima menjadi KPM, diindikasikan tidak mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenar-benarnya, sehingga kemudian pada saat observasi di lapangan yang dilakukan peneliti bersama dengan Pendamping Sosial, ada beberapa contoh kasus serupa yang ditemukan. Kesalahan-kesalahan demikian seringkali memberikan dampak yang berkepanjangan ketika di lapangan. Merubah *mindset* masyarakat sangatlah sulit; ada yang kembali terlena dengan bantuan yang didapatkan, sehingga menolak untuk Graduasi mandiri. Sedangkan dari Pendamping Sosial tidak bisa memproses pencabutan hak KPM secara paksa tanpa ada bukti yang telah disetujui oleh Kodinator Wilayah, hal ini akan membawa permasalahan ke ranah yang berbeda dari tujuan awal pengentasan kemiskinan, namun lebih bagaimana cara mengentaskan kemiskinan moral.
2. Kendala Distribusi Kartu Kartu Kesejahteraan Sosial yang Tidak Sepenuhnya Tepat

Semenjak Pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah tentunya gencar untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak secara ekonomi. Pada masa tanggap darurat ini, begitu banyak bantuan sosial (bansos) yang diluncurkan oleh Pemerintah sebagai jaring penguat sosial kehidupan masyarakat bagi keluarga pra-sejahtera yang terkenda dampak Pandemi Covid-19. Ada 3 jenis bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial; Bantuan Komplementer PKH dalam bentuk BPNT Sembako, selanjutnya ada Bantuan Khusus dan Bantuan Tanggap Darurat Covid-19.

Hal demikian seharusnya tidak menjadi permasalahan jika saja sosialisasi terkait sistematika penyaluran bantuan sosial masing-masing dari ketiga bantuan tersebut dipahami dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali masyarakat yang salah paham dengan ketiga jenis bantuan yang seintas sama namun ternyata berbeda tersebut.

Selain karena sama-sama merupakan Program Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial, sekilas Bantuan Sosial PKH dan Bantuan Khusus serta Bantuan Tanggap Darurat Covid-19 merupakan tiga program jaring penguatan dan sosial yang berbeda.

Bantuan Sosial PKH, merupakan jenis bantuan uang yang disalurkan setiap 3 bulan sekali ke rekening masing-masing KPM PKH dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai jumlah komponen yang dimiliki dalam keluarga. Selanjutnya ada Bantuan BPNT Sembako yang merupakan bantuan jenis Komplementer PKH, yang diberikan dalam bentuk uang non-tunai yang tidak dapat dicairkan atau diuangkan. Transaksinya hanya dapat dilakukan di *e-warong* untuk pembelian sembako. Saldo yang tidak dapat diuangkan ini ditransferkan langsung oleh bank penyalur ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

Sedangkan, Bantuan Sosial Tanggap Darurat Covid-19 adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Pandemi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), akan tetapi bukan merupakan bagian dari penerima PKH dan bantuan Komplementer BPNT Sembako.

Untuk persamaan dan pembeda dari ketiga jenis bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini, Sepintas lalu, ketiga jenis bantuan sosial tersebut akan dianggap sama oleh masyarakat awam. Padahal ketiga jenis bantuan tersebut berbeda secara teknis dan sasaran. Meskipun sama-sama merupakan bantuan sosial dari Program Kementerian Sosial dan sumbernya pun sama-sama dari DTKS Terpadu, akan tetapi, ketiga jenis bantuan tersebut berbeda. Pertama ada Bantuan Sosial dari PKH, bersyarat; terdaftar di DTKS dan memiliki komponen di dalam keluarga, dicairkan setiap 3 bulan sekali dengan jumlah bantuan yang berbeda-beda setiap KPM, tergantung jumlah dari komponen yang dimiliki.

Lalu yang kedua, ada Bantuan Sembako atau yang lebih dikenal sebagai BPNT Sembako, merupakan program komplementer dari PKH, berdampingan dengan Bantuan Sosial PKH; dengan tujuan memperkuat jaringan sosial keluarga. Kemudian, ada Bantuan Tanggap Darurat Covid-19 dan PPKM, bentuknya itu sembako dan uang non-tunai yang disalurkan ke kartu KKS masing-masing penerima. Sepintas lalu lagi, antara Bantuan PKH dan Bantuan Tanggap Darurat Covid-19 dan PPKM perbedaannya cukup jelas dan tidak menimbulkan permasalahan. Akan tetapi, pelaksanaannya di lapangan ternyata mengalami banyak hambatan. Di Kelurahan Pelambuan sendiri, permasalahan terjadi saat masyarakat non PKH menganggap dirinya secara otomatis mendapatkan PKH setelah mendapatkan KKS dari Bantuan Tanggap Darurat Covid-19 dan PPKM. Padahal kenyataannya tidak begitu, kedua jenis bantuan ini berbeda; secara sasaran serta cara mendapatkannya. Namun masyarakat awam yang

kurang mengerti perihal pembeda ini tentunya sangat sulit untuk diberi pengertian. Di kantor PPKH sendiri, hampir setiap hari sepanjang tahun 2020 selalu ada masyarakat yang datang untuk menanyakan perihal ini. Penyebab dari semua ini adalah kesamaan kartu KS yang diterima oleh masyarakat yang menerima PKH dan yang menerima bantuan tanggap darurat. Sehingga demikian, masyarakat yang non-PKH merasa mereka juga bagian dari PKH dan tentunya akan melakukan aksi protes saat PKH pencairan. Kesamaan kartu KS ini yang membuat rancu dan menuai permasalahan. Penyebab kerancuan ini dikarenakan terdapat kesalahan sejak awal pada pendistribusian KKS untuk Bantuan Tanggap Darurat Covid-19 dan PPKM.

Kesalahan penyaluran KKS yang sama dengan milik PKH ini mengindikasikan adanya Standar Operasional Prosedural (SOP) dan responsif pelaksana dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak pandemi kurang terstruktur dan tersistematika dengan baik. Tidak saja kesamaan Kartu KS yang dimiliki oleh penerima Bantuan Tanggap Darurat dan PPKM dengan KPM PKH menjadi permasalahan di Kelurahan Pelambuan, aksi tindakan protes dan amukan masyarakat yang mendatangi kantor PPKH, Dinas Sosial, bahkan beberapa titik *e-warong* juga memberikan dampak bagi kinerja Pendamping Sosial di lapangan. Perhatian dan waktu para Pendamping Sosial tidak lagi hanya terfokus dalam membina KPM, tetapi juga harus memberikan penjelasan di waktu dan kondisi yang berbeda-beda pada non penerima PKH.

3. Kendala Pendataan Calon KPM PKH yang Baru

Dalam proses pendataan calon KPM yang baru sebelum ditetapkan menjadi KPM PKH di Kelurahan Pelambuan mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala ini selain bersumber dari Data DTKS Terpadu yang seringkali mengalami kesalahan-kesalahan yang tidak terdeteksi, namun setelah dilakukannya observasi lapangan, ditemukan sebab lain yang menyebabkan pendataan calon KPM PKH yang baru mengalami

hambatan pelaksanaan. Diketahui sumber lain yang dimaksud merupakan lanjutan dari permasalahan sebelumnya terkait Bantuan Tanggap Darurat Covid-19, permasalahan tersebut yakni adanya penambahan calon KPM baru bersumber dari data hibahan non-PKH yang menerima Bantuan Sosial Tanggap Darurat Covid-19 dan PPKM.

Penambahan atau perluasan ini dilakukan secara spontan, tidak lagi melalui berbagai proses validasi lapangan. Alasan mengapa KPM Perluasan ini ada, dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 perekonomiannya turun drastis sehingga masuk ke data DTKS Terpadu. Hal ini menimbulkan permasalahan lanjutan, yakni menjadi banyaknya permasalahan yang membuntuti; verifikasi lapangan tidak berjalan dengan semestinya, sosialisasi yang tidak dapat dilakukan sehingga berdampak pula pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PKH itu sendiri.

Terkait permasalahan non-PKH penerima bantuan Covid-19 menjadi KPM PKH, hal tersebut berlanjut pada permasalahan lainnya. Memang jika kita telaah lagi dasarnya, niat Pemerintah baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya tentunya tidak memberikan manfaat yang optimal. Sebutan untuk KPM dari angkatan bantuan Covid-19 ini adalah KPM Perluasan Program Sembako. Status kepersertaan mereka ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Penyaluran bantuan bagi KPM Perluasan ini juga mengalami banyak hambatan; pencairan yang lebih lambat dari KPM Reguler. *Overload* tampung dari *e-warong*, karena jumlah KPM bertambah banyak. Belum lagi prosedur validasi lapangan yang tidak bisa dijalankan dengan maksimal, sehingga banyak sekali salah sasaran terjadi. Sosialisasi tidak berjalan dengan efektif, menimbulkan banyak ketidakpahaman KPM Perluasan dengan apa itu Program PKH, serta beberapa permasalahan lainnya seperti tidak terawasi dengan baik hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya KPM Perluasan ini, para Pendamping PKH menjadi kelebihan beban kerja.

Selain itu, informasi yang diterima sebagian besar KPM Perluasan masih parsial; tidak semua dari mereka mengetahui berapa nilai bantuan yang mereka dapatkan, mengapa jumlahnya berbeda-beda, apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai KPM PKH, kapan

jadwal pencairan dan informasi lainnya. Para Pelaksana PKH di wilayah Kelurahan Pelambuan sudah berusaha sebaik mungkin untuk dapat meratakan penerimaan informasi yang dimaksud, berbagai media juga telah dimanfaatkan; WhatsApp Grup, postingan Instagram, Youtube dan platform lainnya. Akan tetapi, masih banyak KPM yang tidak terjangkau sebab tidak memiliki ponsel dan kendala jaringan komunikasi lainnya.

4. Proses Pemutakhiran Data KPM yang Berlangsung Lama

Selama Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan, hambatan juga ditemukan pada indikator pemutakhiran data. Banyak sekali KPM yang mengeluhkan kalau bantuan yang mereka dapatkan mengalami *pending* atau penahanan pencairan hingga tahap selanjutnya akibat pemutakhiran data yang berlangsung lama dan lambat. Pemutakhiran data sendiri memiliki dua jenis; pemutakhiran data awal dan pemutakhiran data reguler/rutin. Pemutakhiran data awal adalah sebuah proses lanjutan yang dilakukan setelah calon peserta PKH dinyatakan *eligibel* (ada komponen) dan dinyatakan resmi menjadi peserta PKH. Proses ini dilakukan setelah pelaksanaan validasi awal; melengkapi dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk kesempurnaan data hasil validasi, terutama data fasilitas kesehatan dan pendidikan (Sosial, 2021). Sedangkan pemutakhiran data reguler/rutin adalah pembaharuan data peserta PKH yang dilakukan setiap saat dan terus menerus sesuai kondisi terkini peserta PKH. Hasil pemutakhiran ini akan berpengaruh pada jumlah bantuan, terutama sekali untuk komponen kesehatan dan pendidikan.

Tidak saja pemutakhiran data awal mengalami hambatan di KPM Perluasan, pemutakhiran data reguler/rutin untuk KPM lama juga mengalami hambatan di hasil verifikasi. Karena lambatnya proses pemutakhiran data reguler ini (hasil dari pemutakhiran data reguler biasanya adalah naik jenjang untuk komponen yang sama atau berakhirnya bantuan komponen sebab peralihan jenjang), menyebabkan banyak

keluhan dari KPM yang masuk ke dalam kotak pengaduan di Kantor PKH dan Dinas Sosial.

Lebih lanjut, setelah observasi lapangan dilakukan, ditemukan sumber lain yang menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi proses pemutakhiran data yang berlangsung lama ini. Salah satu penyebab yang dimaksud adalah ketidaksinkronan data NIK dari komponen yang bersangkutan dengan data yang ada di DTKS, sehingga kemudian tidak terbaca dan menyebabkan bantuan yang diterima menjadi pending. Perlu dilakukannya pembenahan terlebih dahulu dengan DISDUKCAPIL agar status bantuan pending tadi dapat dicairkan.

Selanjutnya, sumber penyebab lainnya adalah masih banyak KPM yang abai dengan kelengkapan administrasi, atau data administrasi hilang di sistem (*error*). Ketidaklengkapan administrasi ini akan berimbas pula pada status *invalid* jika data yang ada di PKH dipadankan dengan DISDUKCAPIL dan menghasilkan ketidaksesuaian, yang berujung nantinya akan berpengaruh pada terlambatnya pencairan bantuan.

Pemutakhiran komponen untuk naik jenjang atau beralih jenjang prosesnya akan berlangsung lebih lama prosesnya dibandingkan dengan pemutusan bantuan komponen. Hal ini disebabkan karena verifikasi komponen dilakukan dengan banyak tahap, terlebih yang diurus tidak satu dua orang, maka proses yang lama sebenarnya adalah hal wajar jika saja para KPM mau mengerti dan memahami sirkulasi perihal ini. Pembenahan NIK di Disdukcapil dengan DTKS juga berlangsung dalam kurun waktu yang tidak sebentar, sebab persoalan yang sama, banyak tahap yang perlu dilewati dan daftar antrian yang panjang. Tapi setidaknya, para Pelaksana PKH di lapangan sudah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersingkat durasi dan mengecek perkembangan status pembenahan setiap harinya.

b. Hambatan Sebab Eksternal

1. Rendahnya Partisipasi dan Tingkat Pemahaman KPM Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah sebuah program yang memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup KPM dengan berbagai fokus dalam aspek kehidupan, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan juga bantuan ekonomi. Akan tetapi, setelah observasi dan wawancara dilakukan di Kelurahan Pelambuan, peneliti menemukan kelemahan dari program ini. Program Keluarga Harapan (PKH) diketahui tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Meskipun bantuan PKH pelaksanaannya diatur dan dijalankan oleh Pendamping Sosial sebagai tonggak utama, juga adanya materi peningkatan kualitas hidup (P2K2) yang diberikan guna mengedukasi KPM terhadap bagaimana kiat-kiat agar dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung lagi pada bantuan pemerintah. Program ini bergerak dengan sifat top to down, dimana partisipasi masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, dan dari masyarakatnya sendiri pun sangat sulit dikordinasikan untuk dapat mengikuti arahan dengan baik.

Misalkan saja perihal sosialisasi atau pertemuan kelompok, tidak sedikit KPM di Kelurahan Pelambuan yang tidak berhadir dengan berbagai alasan; sibuk bekerja, sakit dan segala macam alasan lainnya. Akan tetapi, ketika pencairan diumumkan, mereka berbondong-bondong untuk menjadi paling cepat dalam mengakses bantuan. Tidak hanya itu saja, seringkali KPM juga abai terhadap kewajiban dari komponen yang mereka miliki. Misalkan saja, komponen kesehatan; balita, masih banyak kasus dimana si pengurus komponen (orangtua dari balita yang menjadi komponen), tidak rutin menjalankan kewajibannya dalam mengecek kesehatan si balita ke pelayanan kesehatan. Setelah ditelusuri penyebab-penyebab dari rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat ini melalui observasi dan wawancara, ditemukan beberapa sebab seperti, rendahnya pemahaman mereka terkait apa itu PKH, hak dan kewajiban mereka sebagai KPM,

dan informasi lainnya terkait Program. Hal ini dikarenakan mereka yang tidak mendapatkan atau tidak mengikuti sosialisasi program yang diberikan dengan baik dan benar.

Faktor lainnya dikarenakan audiens dari Pendamping Sosial kebanyakan adalah orangtua, tidak jarang mereka sebagai Pendamping Sosial mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan seperti misalnya dianggap menggurui atau disebut yang tidak-tidak dikarenakan KPM merasa diperintah ini oleh yang lebih muda. Banyak tantangan terkait hal ini, dan perlu durasi yang panjang untuk menyamaratakan tingkat partisipasi dan pemahaman seluruh KPM di Kelurahan Pelambuan pada satu titik yang sama. Niat, ide serta tindakan selalu diupayakan demi dapat meningkatkan rendahnya partisipasi dan pemahaman mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada seluruh KPM di Kelurahan Pelambuan.

2. Kendala Teknis yang Terjadi Pada Saat Penyaluran Bantuan Sosial dan Komplementer

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pelambuan jika dikaitkan dengan indikator penyaluran bantuan sosial maupun komplementer, banyak sekali mengalami kendala baik yang sifatnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat maupun lama. Kendala teknis yang ditemukan pada saat penyaluran bantuan sosial maupun komplementer seringkali berkisar pada terlambatnya pencairan bantuan sosial atau bahkan saldo kosong di rekening KPM. Kendala secara teknis, Bantuan Sosial akan mengalami kendala pencairan karena sebab-sebab berikut, diantaranya; adanya sinkronisasi data DISDUKCAPIL dengan DTKS, Pemutakhiran Data yang berlangsung dalam durasi yang lama, atau bahkan data administrasi yang mengalami *error* karena hilang di sistem atau juga karena tidak diperbarui. Sedangkan untuk kendala pencairan dari bantuan Komplementer BPNT Sembako disebabkan oleh permasalahan; *e-warong* yang kelebihan tampungan KPM yang ingin mencairkan bantuan,

mesin gesek ATM yang rusak, ATM rusak, saldo di rekening kosong, sampai pada permasalahan ATM yang hilang.

Meskipun dalam penyaluran seringkali terjadi kendala yang demikian, akan tetapi jenis kendala seperti ini sudah sangat sering terjadi, dan penyelesaiannya pun dapat terkondisikan dengan baik. Beliau juga menambahkan, kendala-kendala serupa sudah menjadi langganan setiap kali pencairan berlangsung.

2) Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pelambuan, jika dikaitkan dengan indikator Pendamping Sosial, masih banyak sekali mengalami kendala atau hambatan jika ditinjau dari segala macam aspek. Setelah observasi dan wawancara dilakukan, peneliti menemukan kendala dari Pendamping Sosial dengan pengaruh paling besar, dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pelambuan. Kendala yang dimaksud adalah kurangnya jumlah Pendamping Sosial yang ada di Kelurahan Pelambuan. Sebagai kelurahan dengan jumlah KPM terbanyak selama dua tahun terakhir ini, Pendamping Sosial yang ada di Kelurahan Pelambuan hanya terdiri dari 6 orang; bahkan wilayah kerja mereka tidak terfokuskan pada satu wilayah, melainkan dua sampai 3 kelurahan dipegang oleh satu Pendamping Sosial. Di Kelurahan Pelambuan jumlah binaan setiap Pendamping Sosial tidak terbagi dengan rata, ditambah dengan jangkauan mereka terhadap setiap KPM tidak berada dalam satu kelurahan yang sama; terpecah. Hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri bagi para Pendamping Sosial untuk mendampingi KPM di setiap wilayah. Selain dikarenakan mereka harus menuju ke tempat tinggal KPM dengan transportasi sendiri, mereka kadang juga harus mengeluarkan uang lebih untuk biaya transportasi apabila uang transportasi mereka tidak dicairkan dengan segera. Kendala selanjutnya adalah, Pendamping Sosial diharuskan menghapal

jalan dan rumah setiap KPM untuk diberikan dampingan atau binaan selama Pandemi Covid-19. Jika sebelum Pandemi Covid-19, pertemuan kelompok P2K2 bersifat berkumpul di ruang aula besar seperti Masjid atau bahkan rumah salah satu KPM yang memiliki halaman yang luas, maka selama Pandemi Covid-19 ini, para Pendamping Sosial di Kelurahan Pelambuan memilih alternatif dari pintu ke pintu untuk pemberian sosialisasi serta hal lainnya yang berhubungan dengan program. Pendamping Sosial tidak saja berurusan dengan satu dua orang KPM dalam satu harinya, tapi jika setiap kali mereka ada kegiatan lapangan, maka durasi waktu yang dibutuhkan juga tidaklah sebentar. Bahkan untuk menyelesaikan satu kegiatan lapangan, Pendamping Sosial membutuhkan waktu berhari-hari untuk menuntaskan semua KPM binaan.

Masih sering pula terjadi kasus KPM pindah alamat tanpa memberi laporan ke Pendamping Sosial, sehingga hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan tambahan untuk Pendamping Sosial mencari tahu alamat rumah KPM bersangkutan. Kurangnya jumlah dari Pendamping Sosial yang ada juga menjadi hambatan paling besar dan berpengaruh bagi pelaksanaan PKH di Kelurahan Pelambuan.

IV. SIMPULAN

Hambatan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pelambuan, sangat bergantung pada Kebijakan dari program itu sendiri dan Pendamping Sosial sebagai pelaksana program di lapangan. Berikut adalah hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan pada saat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2021:

- a. Hambatan Sebab Internal dari Program Keluarga Harapan (PKH): diantaranya adalah: terdapat ketidaksinkronan antara data DTKS dengan situasi KPM yang sebenarnya,

kendala distribusi Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang tidak sepenuhnya tepat, kendala pendataan calon KPM PKH yang baru, proses pemutakhiran data KPM yang berlangsung lama

- b. Hambatan Sebab Eksternal dari Program Keluarga Harapan (PKH): rendahnya partisipasi dan tingkat pemahaman KPM terhadap Program Keluarga Harapan (PKH), kendala teknis yang terjadi pada saat penyaluran Bantuan Sosial dan Komplementer.
- c. Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH): Kendala yang dimaksud adalah kurangnya jumlah Pendamping Sosial yang ada di Kelurahan Pelambuan. Kendala selanjutnya adalah, Pendamping Sosial diharuskan menghapal jalan dan rumah setiap KPM untuk diberikan dampingan atau binaan selama Pandemi Covid-19. Masih sering pula terjadi kasus KPM pindah alamat tanpa memberi laporan ke Pendamping Sosial.

REFERENSI

- Nunung, N. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008*, 8.
- Pratiwi, D. (2020, Juli 7). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)*. Dipetik November 5, 2020, dari repository.metrouniv.ac.id: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3467/>
- Purnawiratama, B. (2018). *Kehidupan Sosial Ekonomi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Lambung Mangkurat.

- Rizal, M. (2018, Agustus 21). *Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017*. Dipetik November 4, 2020, dari Digital UIN Sunan Ampel: <http://digilib.uinsby.ac.id/27831/>
- Nurdiana. (2017, Januari 10). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa*. Dipetik November 4, 2020, dari repositori.uin-alauddin.ac.id: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13001/>
- Sosial, D. J. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021 - 2024*. Jakarta: Keluarga Kementrian Sosial RI.
- Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Subarsono, A. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astriana, W. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economics Development Analysis Journal, Vol 1 (1)*, 2.
- RI, K. S. (2020, Oktober 10). *Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)*. Diambil kembali dari PKH | Program Keluarga Harapan: <https://pkh.kemensos.go.id/>